

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, A. (2021). *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen Pergeseran Paradigma dan Perluasan Norma Edisi Kedua* (cetakan ke-2). Jakarta: Prenada Media Group.
- Arief, I. (2022). *Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan dan Diskresi Antara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana* (Cet.1). Jakarta Pusat: Penerbit Mekar Cipta Lestari.
- Awaluddin. (2023). *Hitam Putih Eksistensi kepolisian* (cetakan ke-1; Surahman, Ed.). Klaten: Penerbit Nas Media Pustaka.
- Az, L. S. (2015). *Hukum Pemerintahan Daerah (Mengurai Problematika Pemekaran Pasca Reformasi di Indonesia* (Cetakan Ke-1). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Busroh, A. D. (1998). *Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Djaenur, A. (n.d.). *Modul Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah* (Vol. 3). repository.ut.ac.id.
- Efendi, A., & Poernomo, F. (2019). *Hukum Administrasi* (cetakan ke-1; D. M. Listianingsih, Ed.). Jakarta Timur: Penerbit Sinar Grafika.
- Harianto, Rahardjo, M., & Baru, B. M. (2022). *Pengelolaan Dana Desa dan Tindak Pidana Korupsi (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya)* (Cetakan Ke-1; A. Wiyaka, Ed.). Surabaya: UD. Dalle Nurul Utama.
- Kurnianingrum, F., Shandra, Bimasena, A., Hakim, D. A., Nugroho, F. A., & Falufi, R. (2021a). *Petunjuk Teknis Operasional Penatausahaan Keuangan Desa*. Jakarta: Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri.
- Kurnianingrum, F., Shandra, Bimasena, A., Hakim, D. A., Nugroho, F. A., & Falufi, R. (2021b). *Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri.
- Kusdarini, E. (2020). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UNY Press.
- Latif, A., Effendi, M., & Ikram, M. D. (2021). *Penetapan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi* (1st ed.). Jakarta: Penerbit Kencana.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum* (Ed.1). Jakarta: Prenada Media Group.
- Munaf, Y. (1945). *Hukum administrasi negara* (Cetakan Pe; E. Chaidir, Ed.). Pekanbaru-Riau: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Pramukti, A. S., & Chahyaningsih, M. (2016). *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* (Cetakan Ke-1). Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Dana Desa* (Tarmizi, Ed.). Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Romi Sihombing. (2022). *Cacat Administrasi Pembatalan Sertifikat Tanah oleh BPN Tanpa Putusan Pengadilan* (cetakan ke-1). Jakarta: Penerbit Kencana.
- Situmorang, V. M., & Juhir, J. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Slamet, K., & Sukoasih, H. (2023). *Pengelolaan dan Digitalisasi Perbendaharaan Negara*. Yogyakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Suadi, A. (2021). *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. Kota Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugandha, D. (1989). *Pengantar Administrasi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Intermedia.
- Soerjono Suekanto, dan S. M. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhendar. (2015). *Konsep Kerugian Keuangan Negara Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dan Pidana Khusus Korupsi* (Cet.1). Jakarta Selatan: Setara Press.
- Utama, I. M. A. (2007). *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Daerah Berkelanjutan* (Cetakan 1). Bandung: Penerbit Pustaka Sutra.
- Wajdi, F., Imran, & Hasanuddin, M. I. (2020). *Pengawasan hakim dan penegakan kode etik di Komisi Yudisia* (cetakan ke-1; K. Ahmad, Ed.). Jakarta Timur: Penerbit Sinar Grafika.
- Winnarno, N. B. (2008). *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Yuwono, I. D. (2010). *Kisah Para Markus (Makelar Kasus)* (Cetakan Ke-1). Yogyakarta: Media Pressindo.
- Zamzami, F., Faiz, I. A., & Mukhlis. (2018). *Audit Internal, Konsep Dan Praktik* (Siti, Ed.). Yogyakarta: UGM Press.

B. Artikel/Jurnal/Prosiding Seminar/Hasil Penelitian

- Adnyana, I. G., & Dewi, C. I. D. L. (2022). Kedudukan Desa dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai*, 7(1), 74.
- Anggoro, F. N. (2022). Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pegawai Negeri Sipil (Ratio Legis Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil). *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(94).
- Arief, I. S., Su'un, M., & Djunaid, A. (2018). Pengaruh Kedudukan Kelembagaan, Ambiguitas Peran dan Konflik Peran Terhadap Independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dengan Budaya Lokal Sebagai Variabel Moderating. *Journal of Management and Business*, 1(2), 128–155.
- Asmara, W. W. (2022). Optimalisasi Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP): Meneladani Sifat Rasulullah Saw. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 6(158), 271–291.

- <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i2.5233>
- Basalama, F. A. (2017). Eksistensi Asas Legalitas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Lex Crimen*, VI(5).
- Dewa, K. K. (2022). Pengaturan Independensi Inspektorat Daerah Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(5), 1016–1026.
- Fauzanto, A. (2020). Problematika Korupsi Dana Desa pada Pelaporan dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif. *Jurnal Hukum*, 3(1), 46–47.
- Gamar, N., & Djamhuri, A. (2015). Auditor Internal Sebagai “Dokter” Fraud. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 107–123. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6009>
- Gandara, M. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. *Jurnal Khazanah Hukum*, 2(3), 92–99. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3>.
- Gunawan. (2019). Pengawasan Implementasi Dana Desa Di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14(1), 99–107.
- Hamid, S. H. (2022). Penerapan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Terhadap Pengawasan Inspektorat Daerah Di Kabupaten Maros. *Journal of Administrative and Sosial Science*, 3(2).
- Heryansyah, D. (2015). Problematika Diskresi dalam Sistem Hukum. *Jurnal Yuridis*, 2(2), 249–262.
- Indonesia Corruption Watch. (2022). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Semester 1 Tahun 2022.*, dari [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren Penindakan Semester I 2022.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Semester%20I%202022.pdf)
- Indonesian Corruption Watch. (2022). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022.*
- Indonesia Corruption Watch. (2022). *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021* pp. 23–24.
- Isnayanti, K., Maherni, L. B. S., & Irayani, M. P. (2017). Dampak Akuntabilitas Pemerintahan Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Jagaraga). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7(2), 114.
- Kaliuzhnyj, R. A. (2022). Advantages and Disadvantages of Local Government Reform in Ukraine and Foreign Countries: A Comparative Legal Analysis. *Journal of PA Persona E Amministrazione*.
- Kogoya, H., Posumah, J. H., & Ogotan, M. (2015). Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Masyarakat Desa di Desa Wambo Kecamatan Gupura Kabupaten Lanny Jaya. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 4 (32).
- Labolo, M. (2017). Peluang dan ancaman otonomi desa pasca undang-

- undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 7(2), 73–82.
- Laudia, A. (2018). Modifikasi Hukum Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten/kota dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 8(2), 1–17.
- Lekipiouw, S. H., Salmon, H., & Lainsamputy, N. (2022). Model Pengawasan dan Tata Hubungan Kewenangan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. *Legal Standing, Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–19.
- Lewokeda, K. M. D. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan. *Jurnal Mimbar Keadilan*, 14(28), 183–196.
- Litahayu, D. (2019). Rawan Korupsi Isu dalam Implementasi Dana Desa. *Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 22.
- Mahriadi, N., Agustang, A., Idhan, A. M., & Rifdan. (2021). Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminstrasi Dan Pelayanan Publik*, VIII(2).
- Masdan, S. R., Ilat, V., & Pontoh, W. (2008). *Analisis Kendala-kendala Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo*. (1), 150–159.
- Maulana, M. (2023). Risiko Korupsi Pengelolaan Anggaran Desa. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(2), 215.
- Muin, F., & Herman. (2018). Diskresi Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Tanjungpura Law Journal*, 2(2), 151–165.
- Pardiyanto, M. A. (2017). Konflik Sosial Dan Ekonomi Sebagai Dampak Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(2), 186–201.
- Rahman, F. (2011). Korupsi di Tingkat Desa. *Jurnal Governance*, 2(1).
- Ramli. (2020). Tugas , Wewenang Serta Kewajiban Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 2(1), 41–47.
- Riswara, A., Eltisah, E., Fadillah, D. F. N., Efendi, R., Oktaviani, R., & Gunawan, Y. (2022). Kendala dalam Penyusunan RKPDes oleh MAHASISWA UNIGAL (Studi kasus pada kelompok Desa “Kendala RKPDES” di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran). *Repository.Unigal.Ac.Id*.
- Rosyadi, M. I. (2016). Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam Menilai Kerugian Negara. *Jurnal Mimbar Keadilan*, 26–53.
- Rumihin, M., Eliazer, S., & Nirahua, M. (2023). Legalitas Penetapan Kerugian Keuangan Negara Oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sebagai Dasar Memeriksa Perkara Korupsi.

- Bacarita Law Journal*, 3(2).
<https://doi.org/10.30598/bacarita.v3i2.8502>
- Rustendi, T. (2017). Peran Audit Internal Dalam Memerangi Korupsi (Upaya Meningkatkan Efektivitas Fungsi APIP). *Jurnal Akuntansi*, 12(2).
- Salam, S. (2019). Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa. *Jurnal Nurani Hukum*, 1(1).
<https://doi.org/10.51825/nhk.v1i1.4818>
- Santoso, B. T., Nainggolan, S. D. P., Sinambela, J., & Rahman, K. (2023). Optimalisasi Peran Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Kewenangan Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 jo. Perma No. 4 Tahun 2015. *Jurnal Gagasan Hukum*, 5(02).
- Sarip, Rahman, N., & Dewi, E. K. (2019). Transformasi Pembangunan Local Self Government. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019*, 237–252.
- Simangunsong, G. (2022). Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Telah Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara : Sebuah Analisis. *Jurnal Dharmasisya Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1(4).
- Siwy, M. I., Saerang, D. P. E., & Herman Karamoy. (2016). *Pelaksanaan Fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Untuk Menunjang Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado*. 7(2), 1–12.
- Sugiman. (2018). Pemerintahan desa. *Jurnal Binamulia Hukum*, 7(1).
- Sugito, W., Ardiansah, & Fahmi, S. (2023). Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Selodang Mayang*, 9(2).
- Sumanti, R., & Besar, A. (2020). Upaya Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Di Aceh Melalui Internal Audit Capability Model (Iacm). *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2).
- Wahyu, S. H. (2015). Kelembagaan dan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Repository Universitas Medan Area*.
- Walean, T., Mantiri, M. S., & Pati, A. B. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinisir Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 3.
- Wirabuana, Z., Nirahua, S. E. M., & Bakarbesy, A. D. (2023). Kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Menyatakan Kerugian Keuangan. *Jurnal MATAKAO Corruption Law Review Pusat Kajian Korupsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, 1(1).
- Witasari, A. (2016). Perspektif Teori Kewenangan Dalam Rangka Penegakkan Prinsip-Prinsip Syariah. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, III(1), 12–20.
- Yohanes, E. (2018). Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten

Bulungan. *Jurnal Paradigma*, 7(2).

Yuliana, F. E., Suddin, A., & Suprayitno. (2020). Pengaruh Motivasi Berprestasi dan Kompetensi Terhadap Kinerja Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Pada Inspektorat Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 14, 78–91.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

D. Skripsi/Tesis/Disertasi

Noerman, M. F. (2017). *Hubungan Hasil Pengawasan APIP dan BPK dalam Rangka Audit dengan Tujuan Tertentu dalam Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pietersz, J. J. (2016). *Pengujian dalam Penggunaan Kewenangan Pemerintahan*. *Doctoral Dissertation*, Universitas Airlangga.

Purba, M. A. (2018). *Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Pada Bank Bri Syariah Kc Pematangsiantar*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Website

Amirullah. (2022). Polres Pasangkayu Tetapkan Bendahara Desa Sebagai Tersangka Korupsi Dana Desa. Diakses pada 26 November 2023, dari <https://makassar.antaraneews.com/berita/452871/polres-pasangkayu-tetapkan-bendahara-desa-sebagai-tersangka-korupsi-dana-desa>

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019). Kaur Keuangan Desa Sepang Jadi Tersangka. Diakses pada 26 November 2023, dari <https://kalbar.bpk.go.id/kaur-keuangan-desa-sepang-jadi-tersangka/>

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2015). *Warta Pengawasan Membangun Good Governance Menuju Clear Government: Kawal Keuangan Desa*. Diakses pada 26 November 2023, [https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Warta/2015/Final WP Edisi HUT 70 RI 2015 web.pdf](https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Warta/2015/Final%20WP%20Edisi%20HUT%2070%20RI%202015%20web.pdf)
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. (2018). UU Desa dan Kemandirian Pemerintahan Desa. Diakses pada 20 Maret 2024, dari dpmd.jatimprov.go.id website: <https://dpmd.jatimprov.go.id/component/content/article/90-berita/570-uu-desadan-kemandirian-pemdes>
- Hidayah, F. (2023). Ketahui 5 Celah Korupsi Dana Desa Ini, Tidak Ngajarin Korup Tapi Biar Masyarakat Kritis Soal Aliran Dandes. Diakses pada 16 November 2023, dari <https://www.klikpendidikan.id/news/35810399371/ketahui-5-celah-korupsi-dana-desaini-tidak-ngajarin-korup-tapi-biar-masyarakat-kritis-soal-aliran-dandes>
- Inspektorat kabupaten. (2022). Inspektur Lakukan Monitoring dan Evaluasi Capaian Program Kerja Pengawasan Tahunan 2022. Diakses pada 1 April 2023, dari <https://inspektorat.nunukankab.go.id/inspektur-lakukan-monitoring-dan-evaluasi-capaian-program-kerja-pengawasan-tahunan-2022/>
- Kompas.com. (2020). Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019. Diakses pada 19 Oktober 2023, dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desaterbanyaktunculpada2019>
- Kompastv Lampung. (2022). Korupsi Dana Desa, Mantan Kepala Desa Diringkus Polisi. Diakses pada 19 Oktober 2023, dari <https://www.kompas.tv/regional/353707/korupsi-dana-desamantan-kepala-desadiringkus-polisi>
- Natalia, D. L. (2021). Memaksimalkan APIP untuk memulihkan ekonomi dan memberantas korupsi. Diakses pada 2 Februari 2024, dari <https://www.antaraneews.com/berita/2179058/memaksimalkan-apip-untuk-memulihkan-ekonomi-dan-memberantas-korupsi>
- Pemerintah Kabupaten Serang. (2020). Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Dana Desa Oleh Inspektorat Selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Diakses pada 16 November 2023, dari <https://serangkab.go.id/berita/tata-cara-pembinaan-dan-pengawasan-dana-desa-oleh-inspektorat-selaku-aparat-pengawasintern-pemerintah-apip>
- Puryanto, W. (2022). Pembinaan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Se-Kabupaten Magelang Tahun 2022. Diakses pada 12 Desember 2023, dari <https://prokompim.magelangkab.go.id/home/detail/pembinaan-kepala-desadan-perangkat-desase-kabupaten-magelang-tahun-2022/1781>
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2023). Kenali Berbagai Modus Korupsi di Sektor Desa. Diakses pada 8 Oktober 2023, dari

- <https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20230821-null>
 Pusat Komunikasi dan Informasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia. (2021). Ini 4 Tingkatan Korupsi Di Pemerintahan Desa Menurut Menteri Desa. Diakses pada 12 Desember 2023, dari <https://puskominfo-ppdi.or.id/ini-4-tingkatan-korupsi-di-pemerintahan-desa-menurut-menteri-desa/>
- Sadya, S. (2023). Anggaran Dana Desa Meningkatkan Jadi Rp70 Triliun pada 2023. Diakses pada 8 Juli 2023, dari <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/anggaran-dana-desa-meningkat-jadi-rp70-triliun-pada-2023>
- Setyadi, R. (2021). Paradigma Baru Pengawasan: APIP Sebagai “Strategic Partner.” Diakses pada 3 April 2023, dari <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/paradigma-baru-pengawasan-apip-sebagai-strategic-partner>
- Simpeldesa. (2020). Apakah Desa Anda Telah Menerapkan Prinsip Desa Baru? Diakses pada 26 Maret 2023 [https://www.simpeldesa.com/blog/apakah-desa-anda-telah-menerapkan-prinsip-desa-baru/2090/#:~:text=PERAN KABUPATEN%20FKOTA-,a.,perlu ditangani langsung oleh pusat.](https://www.simpeldesa.com/blog/apakah-desa-anda-telah-menerapkan-prinsip-desa-baru/2090/#:~:text=PERAN%20KABUPATEN%20FKOTA-,a.,perlu%20ditangani%20langsung%20oleh%20pusat.)
- Solanki, K. (2022). *Local Self Government Meaning, Importance, Limitations, Accounting Treatment & Accounting for Local Bodies*. Diakses pada 18 November 2023, dari <https://www.toppers4u.com/2022/02/local-self-government-meaning.html>
- Winata, D. K. (2021). Lepas dari Label Buangan, Pengawas Internal Harus Independen. Diakses pada 2 Januari 2024, dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/443834/lepas-dari-label-buangan-pengawas-internal-harus-independen>
- Wisnubroto, K. (2023). Tiga Prioritas Penggunaan Dana Desa 2024. Diakses pada 20 Maret 2024, dari <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7753/tiga-prioritas-penggunaan-dana-desa-2024?lang=1>
- Zuhri, M. H. (2021). Awasi Anggaran Desa, Inspektorat Lakukan Audit dan Monev. Diakses pada 1 April 2023, dari <https://www.nganjukkab.go.id/home/detail-kabar/awasi-anggaran-desa-inspektorat-lakukan-audit-dan-monev>